

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 didefinisikan sebagai berikut :¹²

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

¹² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Warkum Sumitro adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.¹³ Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.¹⁴ Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6 sebagai berikut :

a) Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00,-

b) Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.00,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.00,-

¹³ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.

¹⁴ Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabetika, 2010), hlm.57.

c) Kriteria Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.00,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.00,-

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan jenis usaha besar lainnya. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha mikro kecil dan menengah tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha mikro kecil dan menengah rumahan seperti : perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik diantaranya yaitu :¹⁵

- 1) Sistem pembukuan sederhana dan tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- 6) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

¹⁵ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: Pt Chandra Wacana, 2010), hlm. 32.

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁶ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diakui memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.¹⁷

Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling besar tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar.

UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin,

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 49.

¹⁷ Kementerian koordinator bidang perekonomian, diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/>

distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM ini juga berperan dalam pembangunan ekonomi. UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

UMKM telah menunjukkan perannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi.

Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan mamfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli lebih tinggi. Usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai

proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹⁸

Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mardi Yatmo Hutomo dalam sistem pengembangan ekonomi lokal dan program pemberdayaan daerah memiliki persamaan dalam melakukan pendekatan, misalnya :¹⁹

- 1) Bantuan modal
- 2) Bantuan dalam pendampingan
- 3) Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha
- 4) Penguatan terhadap kemitraan usaha.

Menurut teori di atas, bantuan dalam pendampingan merupakan salah satu proses pemberdayaan yang dapat diterapkan kepada para perempuan melalui pelatihan, beberapa proses pelatihan dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mengumpulkan perempuan dalam pelatihan
- 2) Pelaksanaan pelatihan dengan pemberian materi dan praktik
- 3) Pemberian motivasi kepada setiap peserta melalui rekam jejak pelatih

¹⁸ Sulistyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

¹⁹ Mardi Yatmo Hutomo, 7-10.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2017), hlm. 61.

atau pemberdaya

- 4) Perekrutan anggota pelatihan untuk menjadi karyawati.

Asghar Ali Engineer dalam bukunya yang berjudul islam dan teologi pembebasan menuliskan “Demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam Al-Qur'an”.²¹ Perempuan seringkali tidak mendapatkan keadilan hanya karena masalah gender, dalam islam perempuan yang memiliki keahlian dan peran dalam hal sosial dan ekonomi yang sama dengan laki-laki dapat mendapatkan hak yang sama. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan ketika para perempuan mendapatkan pembebasan memilih pekerjaan yang ia mau tanpa terhalang dengan perbedaan gender.

2. Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat 5 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Kesejahteraan

Dikatakan bahwa aspek kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting dari upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mengakses bantuan sosial. Manfaat ini dibagi

²¹ Abdul Rasyid Ridho, “Reformulasi Tafsir : Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer,” Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir 2, No. 2 : 231. Diakses Melalui <Https://Sophist.Or.Id/Index.Php/Js/Article/View/36> Pada 08 Oktober 2023.

²² Herliawati Agus P, “Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi,” *Jurnal Fsip Ui* ,(2015) 79. Diakses Melalui <Https://Lib.Ui.Ac.Id/Daftikol2?Id=102> Pada 26 Juli 2023.

beberapa aspek utama berikut: “Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan”.

Sementara tingkat pendidikan adalah aspek paling dasar dari kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa pendidikan yang layak. Perempuan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih tinggi, berpartisipasi dalam pekerjaan pemerintah, dan mendapatkan pengaruh politik.

Amartya Sen dikutip dari jurnal studi gender dan anak mengemukakan bahwa pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan hak-hak perempuan memiliki dampak yang besar pada peningkatan kemampuan perempuan untuk mengendalikan lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi.²³ Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga berhenti pada pemberian upah yang setara.

2) Akses

Akses teknologi dan informasi merupakan aspek yang penting untuk membantu para perempuan meningkatkan produktivitas perekonomian. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat

²³ Abdurraafi' Maududi Dermawan, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* : 164. Diakses Melalui <Https://Jurnaliainpontianak.Or.Id/Index.Php/Raheema/Article/Download/569/364> Pada 20 September 2023.

meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka serta mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal. Tanpa kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin semakin terpinggirkan di komunitas, negara, bahkan dunia.

3) Konsientisasi

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

4) Partisipasi

Perempuan berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan manajemen ekonomi. Jenis partisipasi ini mengacu pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pengambilan keputusan formal dan informal, dan suara mereka dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat mereka.

5) Kesetaraan dalam kekuasaan

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan ekonomi sehingga perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

Memberdayakan perempuan merupakan salah satu model strategis pengarusutamaan masalah gender di lingkungan, dengan ciri-ciri sebagai berikut.²⁴

²⁴ Sulkanti Agustin, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan* (Jakarta: Deputi Bidang Pengarustamaan Gender Bidang Ekonomi, 2012).

- 1) Menciptakan lingkungan yang memberdayakan perempuan dan mengikuti sertakan perempuan sebagai peserta yang setara dalam upaya melindungi tanah, air, dan sumber daya alam adalah prioritas utama.
- 2) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengelola sumber daya melalui pembangunan keterampilan individu dan organisasi mereka.
- 3) Meningkatkan akses perempuan terhadap informasi, prosedur manajemen, pelatihan, dan sistem hukum.
- 4) Kelompok perempuan dan jaringannya harus didukung, diperkuat, dan dilibatkan dalam kepedulian lingkungan.
- 5) Mendorong perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam perekonomian.
- 6) Mencapai kesetaraan yang lebih besar bagi perempuan dalam posisi kontrol dan pengambilan keputusan di semua tingkatan.

3. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Banyaknya fenomena yang menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Keberdayaan perempuan

di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga yang meningkat.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan.

Upaya pemberdayaan adalah konsekuensi dari adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu lingkungan masyarakat seperti masyarakat miskin, etnis minoritas, perempuan, dan lainnya yang pada umumnya mengalami ketidakberdayaan. Seringkali keadaan dan perilaku tidak berdayaan kelompok-kelompok kini diklaim sebagai akibat dari diviasi (penyimpangan) yang disebabkan oleh diri mereka sendiri, padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan lebih disebabkan faktor struktural dari adanya kekurangan keadilan dan faktor sosial-kultural yang diskriminatif dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Selain itu, ada hal lain yang perlu dipahami dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu mengenai metode yang diberlakukan selama pemberdayaan :

- 1) Menghilangkan mitos yang menyatakan kaum perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
- 2) Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan sehingga bisa produktif dan tidak menggantungkan nasibnya kepada kaum laki-laki.
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk menempuh pendidikan dan mengaplikasikan pendidikannya dalam pemberdayaan.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Bagi perempuan miskin setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator, yaitu :²⁵

- 1) Indikator keluaran (*output indicator*) ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin.
- 2) Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang di berdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka.
- 3) Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin.

²⁵ Siti Nur Kodariyah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Argo Wisata Di Pilahan Rejowinangan Kotagede Yogyakarta,” *Jurnal Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sunan Kalijaga* (2005), hlm. 19. Diakses Melalui [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/) Pada 27 Juli 2023.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dalam menentukan pilihan hidupnya.